

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Teori keagenan ialah teori yang menjabarkan mengenai perusahaan selaku wadah atas keterkaitan perjanjian yang dilakukan antara manajemen, investor, pemerintah dan kreditor. Teori ini membahas mengenai pengawasan yang memerlukan macam biaya yang mendorong terciptanya keterikatan diantara kelompok tersebut. Teori keagenan merupakan teori yang melibatkan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang bertindak selaku agen maupun prinsipal didalam satu kesempatan (Ardhini dkk, 2011). Keterkaitan teori keagenan dengan penelitian ini yakni keterkaitan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam hal distribusi pengalokasian belanja modal, antar masyarakat, dan pemerintah daerah. Dalam hal mengatur dan mengelola urusan pemerintah daerah, pelayanan, dan pembangunan publik, masyarakat berperan dalam menyerahkan tugas kepada pemerintah daerah.

2.1.2 Analisis Laporan Keuangan Daerah

Analisis laporan keuangan dimaksudkan untuk membantu bagaimana cara memahami laporan keuangan, bagaimana menafsirkan angka – angka dalam laporan keuangan, bagaimana mengevaluasi laporan keuangan, dan bagaimana menggunakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan. Untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan keuangan suatu perusahaan, perlu dilakukan suatu interpretasi atau analisis terhadap data keuangan dari perusahaan yang bersangkutan, dan data keuangan itu akan tercermin dalam laporan keuangannya (Brigham, dkk 2019). Laporan keuangan melaporkan keuangan adalah fakta bahwa laporan keuangan dapat digunakan untuk membantu memprediksi laba dan dividen masa depan. fungsi utama laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak – pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.

2.1.3 Analisis Pendapatan

Standar Akuntansi Pemerintah dalam mendefinisikan pendapatan sebagai semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dalam periode anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah (Mahmudi, 2015), beberapa cara yang dapat dilakukan dalam melakukan analisis pendapatan melalui Laporan Realisasi Anggaran antara lain:

1. Analisis Varians (selisih) anggaran pendapatan
2. Menghitung pertumbuhan pendapatan daerah, meliputi:
 - 1) Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah
 - 2) Pertumbuhan Pendapatan Transfer
3. Menghitung Rasio Keuangan, meliputi:
 - 1) Rasio Kemandirian Daerah
 - 2) Rasio Ketergantungan Daerah
 - 3) Rasio Efektivitas PAD

2.1.4 Analisis Rasio Keuangan

2.1.4.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian, berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak ekstern (terutama pemerintah pusat) semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Artinya, semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD. Semakin tinggi rasio kemandirian daerah, maka tingkat ketergantungan suatu daerah kepada

$$Rasio\ Kemandirian = \frac{Pendapatan\ Asli\ Daerah\ (PAD)}{Transfer\ Pusat + Provinsi + Pinjaman\ (Pendapatan\ Daerah)} \times 100\%$$

pihak eksternal semakin rendah, begitu pula sebaliknya apabila semakin rendah rasio kemandirian daerah, maka tingkat ketergantungan suatu daerah kepada pihak eksternal semakin tinggi. Menurut Undang – undang 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang dimaksud dengan Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu. Pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta pendapatan yang sah. Rumus yang digunakan dalam perhitungan rasio ini adalah:

2.1.4.2 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktifitas pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD, yang diukur dengan rasio antara PAD dengan total penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tanpa subsidi (Dana Perimbangan). Menurut Undang – undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada pasal 1 ayat 18 yang dimaksud Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiscal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Rasio ketergantungan keuangan daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Transfer dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Asli Daerah) antara lain: Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Semakin tinggi rasio ketergantungan keuangan daerah, berarti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin tinggi dan demikian sebaliknya. Berdasarkan Pasal 1 angka 18, undang – undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber – sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki peranan penting dalam pembangunan suatu daerah. Rasio Ketergantungan keuangan daerah juga menggambarkan kemampuan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Sehingga, ketergantungan terhadap pemerintah pusat dapat berkurang. Semakin tinggi Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, semakin tinggi tingkat kemampuan daerah dalam menerima Dana Perimbangan (transfer pusat), Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus yang merupakan komponen utama Pendapatan Transfer menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat semakin tinggi. Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Ketergantungan adalah:

2.1.4.3 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

$$Rasio\ Ketergantungan\ Daerah = \frac{Pendapatan\ Transfer}{Total\ Pendapatan\ Daerah} \times 100\%$$

Pengukuran tingkat efektivitas ini untuk mengetahui berhasil tidaknya pencapaian tujuan anggaran yang memerlukan data-data realisasi pendapatan dan target pendapatan. Analisis efektivitas menggambarkan kemampuan pemda dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target PAD yang ditetapkan berikut formula untuk mengukur tingkat Efektivitas. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Kusuma, 2023). Sedangkan menurut (Wilujeng, 2023) Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas PAD, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Menurut (Hapsari, 2022) rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

2.1.4.4 Kegunaan Rasio Keuangan Sebagai Indikator Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Mahmudi (2011), kegunaan rasio keuangan digunakan sebagai tolak ukur yaitu:

1. Menilai kemandirian dan ketergantungan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. Hasil atas analisis rasio keuangan daerah akan diketahui tingkat kemandirian dan ketergantungan keuangan daerah.
2. Mengukur efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerah. Hasil atas analisis rasio keuangan daerah akan diketahui tingkat efektivitas keuangan daerah.
3. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode tertentu. Berdasarkan hasil dari analisis rasio keuangan daerah dapat diketahui apakah daerah mengalami pertumbuhan dalam perolehan pendapatan atau tidak. Selain itu, juga dapat diketahui apakah daerah mengalami pertumbuhan dalam hal pengeluaran keuangan daerah. Hasilnya akan dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan dan evaluasi oleh pemerintah daerah untuk yang akan datang.

2.1.5 Belanja Modal

Belanja modal adalah biaya akuisisi atas aset tetap, biaya atas penambahan atau perbaikan pada aset tetap sendiri yang meningkatkan nilai total aset, atau memperpanjang umur manfaatnya (Gerungan,

2021). Menurut PP nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Menurut Peraturan Pemerintah Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran kepustakaan, peneliti meringkas penelitian terdahulu sejenis yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	M. Saiful Hadi, Dheni Indra Kusuma (2023)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi empiris pada	Independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi Dependen: Belanja Modal	Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pertumbuhan Ekonomi menyatakan bahwa tidak berpengaruh dan tidak mampu memoderasi PAD tidak terhadap alokasi Belanja Modal, Dana Perimbangan menyatakan jika DAU berpengaruh

		Kabupaten/kota Karanganyar tahun 2013 – 2021)		secara signifikan terhadap Belanja Modal.
2	Muh. Zainal Muzaki M, Mega Tunjung Hapsari (2022)	Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi Terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung tahun 2015 – 2021	Independen: APBD, Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi Dependen: Belanja Modal	Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi tidak memiliki pengaruh bagi Belanja Modal pada Pemda Tulungagung periode 2015 – 2021.
3	Sri Mulyani, Halkadri Fitra (2023)	Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Rasio Tingkat Pembiayaan SiLPA terhadap Alokasi Belanja Modal di Kabupaten/Kota Sumatera Barat	Independen: Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Rasio Tingkat Pembiayaan SiLPA Dependen :	Rasio derajat desentralisasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.

			Belanja Modal	
4	Indah Wulandari Wilujeng (2023)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2019 – 2021	Independ ent: Pendapata n Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Kinerja Keuangan Pemerinta h Daerah Dependen : Belanja Modal	Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) mempengaruhi Belanja Modal dengan Positif. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Rasio Efektivitas PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berupa Rasio Ketergantungan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.
5	M. Irvan Fahrul Sitoru, Isnaini Harahap,	Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Provinsi Sumatera Utara	Independent : Kinerja Keuangan Daerah, Anggaran	Secara parsial Kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja

	<p>Rahmat Daim Harahap (2023)</p>		<p>Pendapatan Belanja Daerah (APBD)</p> <p>Dependen: Belanja Modal</p>	<p>modal di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2021. Secara parsial Rasio Efektivitas PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2021. Secara parsial efisiensi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2021. Secara bersamaan Rasio Kemandirian Keuangan, Rasio Efektivitas PAD, dan Efisiensi Keuangan Daerah berpengaruh Terhadap Belanja Modal Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2021.</p>
--	---	--	---	--

6	Siti Nuraini, Mohamad Zulman Hakim (2021)	Pengaruh Rasio Efektivitas, Rasio Kemandirian, Rasio Efisiensi, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Anggaran Daerah Terhadap Belanja Modal di Provinsi Banten	<p>Independen</p> <p>t :</p> <p>Rasio Efektivitas, Rasio Kemandirian, Rasio Efisiensi, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Anggaran Daerah</p> <p>Dependen:</p> <p>Belanja Modal</p>	Dana Alokasi Khusus (DAK), Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisien dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) dalam penelitian memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.
7	Jeivi Prisilia Seroy, Arief F. Kawulur, Royke I.J. Pangkey (2023)	Pengaruh Kemandirian Daerah dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa)	<p>Independent</p> <p>:</p> <p>Kemandirian Daerah, Jumlah Penduduk, Belanja Modal</p> <p>Dependen :</p>	Pengaruh kemandirian daerah dan jumlah penduduk terhadap belanja modal pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), Kabupaten

			Belanja Modal	Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini telah mengungkap temuan yang penting, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kemandirian daerah terhadap belanja modal di BAPENDA Kabupaten Minahasa.
8	Muhammad Aushaf Fernada, Saiful Anwar, Avi Sunani (2023)	Pengaruh Rasio Efektivitas, Efisiensi dan Kemandirian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening di Provinsi Jawa Timur	Independent: Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Kemandirian Dependent: Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Modal	Bahwa Belanja Modal hanya bisa memediasi hubungan Rasio Kemandirian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, sedangkan Rasio Efektivitas dan Efisiensi tidak. Hal ini mengindikasikan bahwa

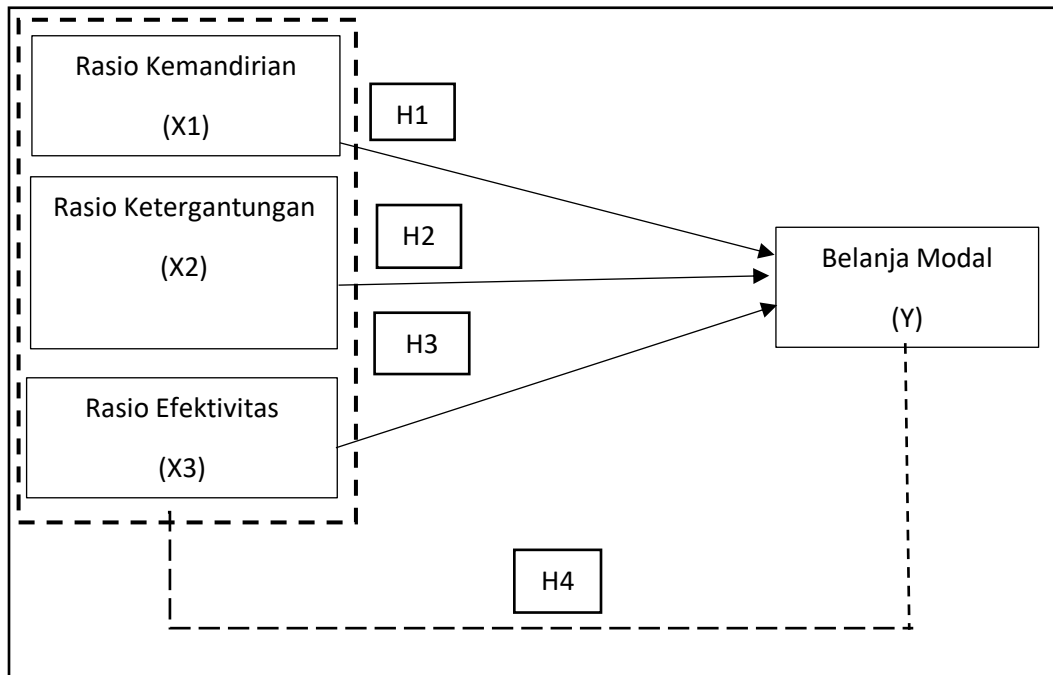
				<p>perbandingan pengeluaran dan pendapatan serta rencananya untuk memperoleh pendapatan di Provinsi Jawa Timur masih tergolong kurang sehingga kontribusinya untuk mempengaruhi belanja modal masih belum terlihat.</p>
9	<p>Febrya ndhie Ananda ,Habibu rahman (2023)</p>	<p>Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal pada 19 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Periode 2018 – 2020</p>	<p>Independent: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Daerah (DAK)</p> <p>Dependent: Belanja Modal</p>	<p>Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal dikarenakan dana yang terdapat pada PAD cukup besar hal ini membuat dana yang dialokasikan terhadap Belanja Modal juga semakin tinggi. Dana Alokasi</p>

				Khusus berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal
10	Maurine Flora Andani (2023)	Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah diProvinsi Lampung	Independent : Rasio Ketergantungan, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Pertumbuhan PAD Dependent: Belanja Modal	Rasio Ketergantungan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal. Secara parsial variabel Rasio Efektivitas PAD tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal

2.3 Kerangka Pemikiran

Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa “kerangka pemikiran” merujuk pada suatu model konseptual yang menggambarkan hubungan antara teori dan faktor yang dianggap penting dalam konteks tertentu.

Berdasarkan rumusan masalah, maka kerangka konsep dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Data Diolah, 2024

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat diketahui melalui 3 (tiga) indikator kinerja sebagai variabel penelitian meliputi (1) Rasio Kemandirian, (2) Rasio Ketergantungan, dan (3) Rasio Efektivitas. Ketiga rasio keuangan tersebut diketahui dengan mengolah data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun 2022. Selanjutnya rasio keuangan daerah tersebut akan diteliti pengaruhnya terhadap Belanja Modal masing – masing daerah di Provinsi Sumatera Barat, baik secara simultan maupun secara parsial.

2.4 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis adalah spekulasi awal mengenai masalah penelitian yang harus diuji secara empiris untuk memastikan kebenarannya. Berdasarkan pemahaman tentang latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan penelitian, hipotesis yang dimunculkan adalah:

2.4.1 Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal

Kemandirian daerah didalam sektor keuangan ditandai dengan kemampuan daerah dalam memenuhi Sebagian atau seluruh kebutuhan belanja modal serta operasional melalui Pendapatan Asli Daerah. Bila kebutuhan yang terpenuhi dengan PAD bertambah banyak, maka daerah tersebut memiliki tingkat kemandirian yang semakin tinggi. Hukum ini berlaku kebalikannya. Bila kebutuhan yang terpenuhi dengan PAD bertambah sedikit, maka daerah tersebut memiliki tingkat kemandirian yang semakin rendah. Kemandirian keuangan bagi daerah bisa ditingkatkan melalui pemaksimalan PAD, sehingga mampu meminimalisir ketergantungan keuangan dari pemerintah pusat.

Berdasarkan teori Halim bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Dalam hal ini berarti Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat belum mampu membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Semakin besar pemasukkan daerah tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan belanja modal daerah tersebut untuk keperluan investasi seperti belanja tanah, belanja bangunan, atau infrastruktur lainnya guna untuk menambah pendapatan daerah sehingga dapat mandiri dengan tidak mengharapkan bantuan dari pemerintah pusat.

Berdasarkan uraian diatas bahwa Kemandirian daerah memiliki timbal balik terhadap Belanja Modal suatu daerah. Dengan Demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang dapat diambil adalah:

H1 : Diduga Rasio Kemandirian berpengaruh signifikan terhadap Belanja modal.

2.4.2 Pengaruh Rasio Ketergantungan Terhadap Belanja Modal

Rasio ketergantungan merupakan rasio yang digunakan untuk menilai tingkat ketergantungan suatu daerah pada pemerintah pusat. Semakin rendah tingkat rasio ketergantungan suatu daerah, dapat disimpulkan bahwa daerah tersebut semakin mampu atau mandiri dalam hal alokasi belanja modal dengan nilai yang tinggi.

Menurut teori Halim ialah rasio ketergantungan keuangan daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan transfer dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan

Asli Daerah) antara lain: Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain – lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Berdasarkan teori tersebut maka kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat masih bergantung kepada pemerintah pusat dengan ditunjukkan oleh besarnya pendapatan transfer dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah seperti berupa Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain – lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Berdasarkan uraian diatas bahwa tingkat Ketergantungan daerah ada timbal balik dengan belanja modal suatu daerah. Maka implikasi dari adanya hubungan tersebut, rasio ketergantungan keuangan daerah juga memiliki hubungan dengan belanja modal yang akan dilakukan oleh suatu daerah. Sehingga dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H2 : Diduga Rasio Ketergantungan berpengaruh signifikan terhadap Belanja modal

2.4.3 Pengaruh Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal

Rasio efektivitas diukur dengan cara membandingkan jumlah realisasi PAD dan target PAD yang dihitung berdasarkan alokasi PAD tahun bersangkutan, sehingga suatu daerah dapat dikatakan efektif apabila jumlah realisasi pendapatan tinggi dari pada target yang ditetapkan. Rasio efektivitas pemerintah daerah tahun sebelumnya tidak berpengaruh terhadap belanja modal tahun berjalan.

Berdasarkan uraian diatas bahwa ada timbal balik Efektivitas dengan belanja modal suatu daerah. Maka implikasi dari adanya hubungan tersebut, rasio efektivitas keuangan daerah juga memiliki hubungan dengan belanja modal yang dianggarkan suatu daerah. Sehingga dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H3 : Diduga Rasio Efektivitas berpengaruh signifikan terhadap Belanja modal

2.4.4 Pengaruh Rasio Kemandirian, Ketergantungan, dan Efektivitas Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat

Rasio Kemandirian, Ketergantungan dan Efektivitas memiliki timbal balik terhadap Belanja Modal suatu daerah. Maka berdasarkan uraian Hipotesis pertama, hipotesis kedua, hipotesis ketiga, terbentuklah hipotesis keempat dalam penelitian ini sebagai berikut:

H4 : Diduga Rasio Kemandirian, Rasio Ketergantungan dan Rasio Efektivitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja modal.